

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

Pada bagian Bab 2 ini akan dijelaskan mengenai keterhubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam tesis ini. Tinjauan literatur ini sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis hasil pengolahan data. Selain itu, bab ini juga akan membahas mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tesis ini.

2.1 Kerangka Konseptual

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana serta menyelenggarakan lalu lintas pembayaran guna menunjang pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana tercantum dalam UU No. 10 tahun 1998.

Perbankan syariah juga memegang peranan penting dalam hal ini, khususnya karena perbankan syariah lebih fokus pada pertumbuhan sektor riil. Sehingga untuk meningkatkan peran perbankan syariah dalam tatanan perekonomian Indonesia, maka perlu dilakukan percepatan pertumbuhan.

Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup pembangunan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan Siamat (2005), di dalam pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan peran serta lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi antara unit *surplus* dana dengan unit *defisit* dana. Karena sebagian besar dana pembangunan bersumber dari perbankan sedangkan perbankan sebagai lembaga intermediasi menggunakan dana pihak surplus untuk turut serta membiayai pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi perbankan dalam pembangunan

ekonomi, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit, dan memperlancar transaksi perdagangan dan peredaran uang (Kuncoro, 2002).

Indonesia merupakan negara yang menganut *dual banking system*, hal ini dikarenakan keinginan umat Islam di Indonesia untuk menjalankan sistem perekonomian yang Islami, didasari kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total. Hal ini ditegaskan Allah SWT dalam QS Al Baqarah (2) ayat 85:

ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِينِهِمْ
تَظَاهِرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسْرَىٰ تُمْفَدُوهُمْ
وَهُوَ مُحْرَمٌ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُونَ بِنِعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضِ مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾

Artinya: *Apakah kalian beriman kepada sebagian alkitab (taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripada kalian, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kalian perbuat (QS Al-Baqarah 2: 85).*

Dari ayat tersebut tersirat pesan, bahwa selama Islam diterapkan secara parsial, maka umat Islam akan mengalami keterpurukan di dunia maupun di akhirat. Karena itulah penerapan prinsip Islam bukanlah hanya dalam kehidupan duniawi saja tetapi harus diimbangi dalam seluruh aspek kehidupan.

2.1.1 Equivalent Rate

Sebagaimana perbankan konvensional, profitabilitas merupakan salah satu tujuan dari perbankan syariah. Namun berbeda dengan bank konvensional, bank syariah diharapkan memiliki kepedulian sosial dan moral sebagaimana mereka mengharapkan profit (Haron, 1997).

Fungsi sosial tersebut dalam Islam diatur secara khas dengan menekankan bahwa setiap kegiatan produksi disamping fungsi ekonomi, harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam QS Al-Hadiid (57) ayat 7 berikut ini:

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ ۗ فَالَّذِيْنَ
ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar (QS. Al Hadiid 57: 7).*

Berdasarkan ayat tersebut terungkap bahwa setiap muslim harus melakukan hal ini karena memang dalam sebagian hartanya melekat hak orang miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi dan investasi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial (Qardhawi, 1997).

Hal ini sejalan dengan tujuan utama keberadaan bank syariah untuk meningkatkan dan membantu perkembangan produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah (Haron, 1997). Sumber dana utama perbankan bersumber dari masyarakat yang berupa tabungan maupun deposito. Dana yang dihimpun perbankan ini digunakan untuk pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip ini terdiri dari tiga kategori, yaitu berdasarkan *profit sharing*, *mark*

up, dan bebas biaya transaksi seperti *qardh*. Selain itu perbankan syariah juga memberikan jasa yang berdasarkan *fee based income*, seperti *save deposit box*, *travellers' cheque*, L/C, dan lainnya (Haron, 1997).

Dana yang dihimpun maupun disalurkan oleh perbankan syariah dengan berdasarkan *profit sharing* sesuai dengan yang tercantum dalam surat An Nisaa (4) ayat 12 berikut ini:

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Artinya: ‘...Maka mereka bersyarikat pada sepertiga...’ (QS. An-Nisaa’ 4:12)

Sedangkan penghimpunan maupun penyaluran dana yang berdasarkan *mark up* tercantum dalam surat Al Baqarah (2) ayat 275 berikut ini:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ”Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

(QS. Al-Baqarah 2: 275).

Berdasarkan kedua ayat tersebut jelaslah Islam melarang segala transaksi yang berbasis bunga. Hal ini dengan jelas dinyatakan dalam Al Qur’an Surat An Nisaa (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”(QS. An Nisaa 2: 29)

Kemudian hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah: “*Innama al bai’u ‘an taradhin*” (hendaklah jual beli itu dengan suka sama suka). Terakhir adalah ijma’ atau kesepakatan para *mujtahid* tentang keharaman mengambil harta orang lain kecuali pemiliknya rela. Beberapa cendekiawan Fiqh kontemporer di antaranya Mustafa Ahmad Az-Zarqa (*Al-Makhdal Al Fiqh Al-Am*, Vol.1 hal. 467) merumuskan asas *ridhaiyyah* sebagai berikut: “*asas yang berlaku untuk memperoleh harta orang atau menghalalkan hak orang lain ialah kerelaan pemiliknya, baik dengan cara perdagangan dan tukar menukar atau pemberian dan pelepasan hak secara suka rela dan kemauan sendiri*”.

Haramnya riba ini selain jelas tercantum dalam ayat-ayat suci Al-Qur’an sebagaimana dikemukakan sebelumnya juga telah menjadi ijma para ulama sedunia (Agustianto, 2007). Sedangkan untuk Indonesia melalui fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang keharaman bunga bank dengan tegas menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan bunga bank adalah haram.

Keburukan riba ini diungkapkan El-Diwany (2003) dengan menyatakan dari hasil penelitiannya terbukti bahwa penggunaan konsep bunga dapat menimbulkan laju penurunan tingkat ketidakteraturan yang semakin tinggi dari waktu ke waktu. Sistem bunga merupakan sebuah sistem yang tidak sejalan dengan sistem entropi yang berjalan secara alamiah. Dalam sistem bunga sesungguhnya telah terjadi *transfer wealth* antara debitur dengan debitur. Dan hal ini akan terus berlangsung hingga waktu yang tak dapat ditentukan, karena sistem bunga berbunga menggunakan perhitungan yang bersifat eksponensial, dimana pertumbuhannya mengikuti pola yang terus meningkat berlipat ganda dari waktu ke waktu.

Pengaruh suku bunga terhadap tingkat tabungan juga ditolak oleh Keynes. Keynes berpendapat bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Tabungan tidak begitu bergantung pada bunga sebagaimana pada tingkat investasi dan kesempatan kerja. Para pengusaha, bukannya para penabung yang mengganggu keseimbangan dan membawa dinamisme pertumbuhan perekonomian (Mannan,1997).

Menurut Cassel, kita telah melihat bahwa menurunnya bunga, misalnya dari 6% menjadi 3% sudah pasti akan melemahkan keinginan untuk menabung bagi sebagian orang. Penurunan itu akan mendorong sebagian orang menarik dananya. Oleh karena itu, cukup beralasan untuk berasumsi bahwa suku bunga tidak mempunyai pengaruh yang besar atas akumulasi modal. Dengan pandangan yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa jumlah penawaran modal dengan bunga 3% atau 6% sama saja. Pareto, seorang ekonom lainnya, juga berpendapat bahwa tabungan tidak dipengaruhi oleh tingkat bunga dan terus akan meningkat bahkan jika besarnya tingkat suku bunga nol sekalipun (Rahman, 2002).

Jadi tidak ada unsur bunga (*interest*) dalam kegiatan transaksi dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Islam hanya dikenal transaksi dengan *mark up* dan bagi hasil sesuai dengan yang disepakati di dalam akad. Maka dari itu sistem perekonomian Islam disebut juga sebagai sistem ekonomi tanpa riba (*interest bearing system*).

Besaran bagi hasil perbankan syariah atas dana pihak ketiga sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh perbankan syariah dari sisi pembiayaan baik dengan *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Apabila nilai nominal bagi hasil dari pembiayaan dibagi dengan dana pihak ketiga maka akan diperoleh *rate of return (nisbah/bagi hasil)*. *Equivalent rate* ini sendiri adalah *rate of return (nisbah/bagi hasil)* perbankan syariah yang nilainya *equivalent* (disetarakan) dengan tingkat bunga simpanan di perbankan konvensional. Nilai nominal bagi hasil dana pihak ketiga ini akan berfluktuasi karena nilainya tergantung pada besaran bagi hasil (*nisbah*) yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan perbankan syariah.

Mulyawan (2003) menyatakan bahwa seorang investor yang rasional tidak dapat mengharapkan pendapatan bank syariah yang stabil, sepanjang aset yang dimiliki bank merupakan aset yang berbagi hasil. Bank syariah harus menjaga kemampuan membayar kembali uang kepada *risk averse depositors* (nasabah giro dan tabungan), dan berusaha untuk menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi bagi *risk taking investors* (nasabah deposito).

Keterkaitannya dengan pertumbuhan aset perbankan syariah adalah pada saat *rate of return (equivalent rate)* perbankan syariah mengalami peningkatan

tentunya akan menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan syariah, apalagi jika nilainya lebih besar dari pada tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh kompetitor (perbankan konvensional). Masuknya dana tersebut tentunya akan meningkatkan jumlah aset perbankan syariah secara langsung, dan secara tidak langsung akan menambah jumlah dana yang dapat dialokasikan dalam pembiayaan sehingga akan lebih banyak menghasilkan laba, dimana laba ini kemudian akan menambah aset perbankan syariah sehingga meningkatkan pertumbuhannya.

2.1.2 Variabel Ekonomi Makro

2.1.2.1 Jumlah Uang Beredar (M_2)

M_2 merupakan jumlah uang beredar dalam arti luas dimana terdiri dari M_1 berupa uang kartal (*currency*) dan uang giral (*demand deposit*) ditambah dengan deposito berjangka (*time deposit*) dan saldo tabungan (*saving deposit*) yang dimiliki oleh masyarakat umum.

Banyaknya jumlah uang beredar (M_2) yang tidak dibarengi dengan penambahan jumlah barang yang ada di pasar akan menyebabkan timbulnya inflasi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi utama khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu laju pertumbuhan inflasi harus diwaspadai karena inflasi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas dan beraneka ragam serta menurunkan tingkat kesejahteraan. Laju pertumbuhan inflasi yang tinggi akan merusak struktur ekonomi dan melemahkan kinerja perekonomian suatu negara.

Besar kecilnya jumlah uang yang beredar ini dipengaruhi oleh penawaran uang, dimana penawaran uang itu sendiri akan memiliki efek. Sukirno (2004) menyatakan bahwa efek penawaran uang memiliki tiga tahap perubahan, yaitu: pertama, akan menimbulkan perubahan atas suku bunga. Kedua, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Dan ketiga, perubahan investasi akan mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan.

Kelebihan jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan menimbulkan inflasi yang berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Inflasi yang terus berlanjut sampai melampaui angka 10% akan berpengaruh pada distribusi pendapatan dan alokasi faktor produksi. Dampaknya terhadap distribusi

pendapatan disebut *equity effect* sedangkan dampaknya terhadap alokasi faktor produksi dan produk nasional disebut *efficiency effect*. Kedua efek tersebut mengasumsikan output sebagai variabel bebas. Sedangkan *output effect* mengasumsikan output sebagai variabel terikat (Khalwaty, 2000).

Dampak inflasi terhadap pendapatan sifatnya tidak merata. Masyarakat berpenghasilan tetap akan mengalami penurunan nilai riil penghasilannya, sehingga daya belinya menurun. Demikian juga orang yang gemar menumpuk kekayaan dalam bentuk uang tunai dan yang meminjamkan modal dengan bunga lebih kecil dari pada tingkat inflasi. Sebaliknya masyarakat yang penghasilannya meningkat melebihi tingkat inflasi dan yang menyimpan kekayaan tidak dalam bentuk uang tunai akan untung karena nilainya akan naik (Khalwaty, 2002). Sehingga inflasi akan mengakibatkan perubahan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dampak ini akan semakin terasa jika inflasi berada di atas 10% dan jika tidak segera diatasi untuk jangka panjang akan menimbulkan kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin.

Inflasi juga berdampak pada biaya produksi, hal ini dikarenakan terus meningkatnya harga faktor-faktor produksi. Inflasi dapat mendorong meningkatnya permintaan atas barang tertentu yang akan mendorong peningkatan produksi barang tersebut. Namun jika inflasi yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi biaya produksi akan menyebabkan harga produk meningkat (Khalwaty, 2002). Padahal saat inflasi daya beli masyarakat melemah akibatnya produk tidak mampu bersaing di pasar, dan ini adalah awal dari sebuah kebangkrutan industri tersebut.

Inflasi dinilai dapat meningkatkan produksi dengan asumsi produksi akan mengalami kenaikan mendahului kenaikan upah. Kenaikan harga produksi mengakibatkan terjadinya keuntungan produsen yang akan mendorong produsen terus meningkatkan produksi (jika inflasi dalam batas wajar yaitu di bawah 5%). Namun jika inflasi di atas 10% dan dalam jangka waktu yang panjang, maka biaya produksi akan naik juga sehingga mengakibatkan berkurangnya keuntungan produsen. Jika keuntungan terus berkurang dan biaya produksi terus meningkat, produsen akan mengurangi produksinya sampai batas yang dinilai memungkinkan untuk terus melanjutkan usahanya. Jika dinilai sudah tidak menguntungkan lagi,

langkah terbaik adalah menghentikan produksi (Khalwaty, 2002). Penghentian produksi ini tentunya akan menimbulkan masalah baru bagi perekonomian, yaitu pengangguran.

Inflasi yang tinggi dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan dampak negatif bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan inflasi akan merusak nilai keadilan sebagai akibat kerugian terhadap hak-hak orang lain dan dapat pula merusak akhlak. Jadi jika tidak segera diatasi *multiplier effect* inflasi akan membawa pada *multicrisis*.

Kenaikan inflasi umumnya diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh pemerintah sebagai regulator untuk mengendalikan besaran jumlah uang beredar. Diharapkan kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan diikuti oleh perbankan dalam menghimpun dana, sehingga *return* yang ditawarkan bagi dana pihak ketiga lebih menarik dan masyarakat akan menyimpan dananya di perbankan guna mendapatkan *return* tersebut. Akibatnya masyarakat akan membandingkan *return* yang mampu diberikan oleh perbankan dengan *return* investasi dan akan memilih mana yang lebih menguntungkan. Saat masyarakat menganggap *return* perbankan lebih menguntungkan maka jumlah dana pihak ketiga akan meningkat dan kebijakan regulator mengurangi jumlah uang beredar terpenuhi. Akan tetapi hal ini lama-kelamaan akan semakin mengurangi nilai investasi.

Keynes menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga akan mempersempit tingkat investasi (Rahman, 2002). Hal ini tentu saja menghambat perkembangan sektor riil yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini, bunga tidak kondusif bagi kemajuan ekonomi, hal ini terbukti dari krisis yang berulang kali terjadi di dunia yang ditengarai sebagai akibat sistem ekonomi kapitalis yang berbasis bunga yang menyebabkan terjadinya *bubble economic*.

Keynes juga menyatakan bahwa jika terus diberlakukan sistem bunga, maka bunga akan mengurangi investasi dan diikuti pengurangan kekayaan masyarakat. Karena tingkat bunga yang lebih rendah akan mendorong memperbesar nilai investasi dibandingkan pada saat tingkat bunga tinggi (Rahman, 2002). Saat tingkat suku bunga tinggi investasi tidak memberikan

keuntungan yang lebih besar, selain itu investasi juga mengandung risiko sehingga akan timbul asumsi lebih untung menyimpan dana di bank berbasis bunga lebih mudah daripada investasi.

Fluktuasi suku bunga berhubungan dengan fluktuasi inflasi yang disebut sebagai efek fisher. Efek fisher merupakan penyesuaian suku bunga nominal terhadap angka inflasi. Ketika bank sentral memutuskan mempercepat peredaran pertumbuhan penawaran uang, akan menyebabkan timbulnya inflasi dan suku bunga nominal yang lebih tinggi (Mankiw, 2001). Kenaikan inflasi biasanya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga yang akan diikuti penurunan investasi dan berdampak pada penurunan GDP *output*, selanjutnya akan menurunkan konsumsi dan daya beli sebagaimana diungkapkan Blanchard (2003).

Dari uraian tersebut dapat terlihat bahwa dengan inflasi akan mengurangi kemampuan masyarakat menggunakan jasa intermediasi perbankan baik untuk menyimpan dananya maupun untuk melakukan pembiayaan guna mengembangkan atau melakukan investasi. Tentu saja hal ini akan berpengaruh pada pembentukan aset perbankan.

Mannan (1997) juga menyatakan bahwa modal membantu buruh untuk menghasilkan lebih banyak, berapa banyakkah produksi tambahan yang disebabkan oleh modal dan berapa banyak oleh tenaga kerja, karena modal tanpa tenaga kerja tidak menghasilkan suatu apapun. Kemudian, pada umumnya pinjaman konsumsi tidak dianggap produktif, namun mengapa bunganya harus dibayar.

Chapra (2000) menyatakan hal yang berbeda, kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral (sistem ekonomi konvensional) menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga dalam rangka mengatasi inflasi. Menurutnya tingkat suku bunga baik rendah maupun tinggi sama saja. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menghukum para pengusaha, tingkat suku bunga yang rendah akan merugikan penabung yang menginvestasikan dana pada instrumen berbasis bunga. Dengan menyalurkan hanya keuntungan *gurem* kepada para investor, terutama kepada investor kelas teri, tingkat bunga yang rendah telah menjadi sumber yang pasti terhadap penindasan jutaan depositan kecil dan melebarkan kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Tingkat bunga yang rendah juga merangsang pinjaman

untuk tujuan-tujuan konsumsi oleh rumah tangga dan pemerintah. Karena itu, meningkatkan tekanan inflasioner. Tingkat suku bunga rendah telah merangsang konsumsi, mengurangi rasio tabungan kotor, mengurangi kualitas investasi, dan menciptakan kelangkaan modal.

Beberapa dampak bunga yang dipaparkan Rahman (2002) sebagai berikut:

- a) Tingkat bunga yang tinggi menghancurkan minat berinvestasi. Tingkat investasi turun, kesempatan kerja dan pendapatan juga menurun. Sebagai akibat menurunnya jumlah pendapatan, tingkat konsumsi agregat juga menurun. Konsumsi merupakan satu-satunya tujuan seluruh kegiatan ekonomi. Suatu penurunan tingkat investasi, juga berarti penurunan kesempatan kerja akan mengurangi permintaan barang terhadap barang serta produk-produk industri dan pertanian dalam suatu negara. Akibatnya kemajuan perdagangan dan industri sekaligus pertumbuhan modal di negara tersebut akan terhambat.
- b) Bunga bersifat rumit dan melemahkan perekonomian. Bagi orang yang memiliki uang untuk ditabung dan diinvestasikan, bunga memberi suatu bentuk tunai. Mereka mendapat jaminan sejumlah persentase bunga tertentu tanpa berperan sama sekali dalam proses produksi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa uang yang mengendap di bank tersebut dapat dimanfaatkan untuk usaha industri dan komersial. tetapi dalam prakteknya pendapat tersebut dapat disangkal. Sebagian besar aset bank dialirkan untuk usaha-usaha non produktif. Hal ini menyebabkan berkurangnya modal yang ada yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan produktif. Kekurangan modal akan menyebabkan kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga menyebabkan semakin banyaknya aset-aset bank terarah pada jalur tunai dan tidak produktif, pada akhirnya akan menurunkan efisiensi marginal modal yang akan menimbulkan kenaikan harga barang. Dengan demikian, bunga menjadikan manusia semakin miskin dengan cara menghambat pertumbuhan modal dan merintangai perkembangan usaha-usaha yang produktif. Seperti yang dinyatakan oleh Cassel yang dikutip oleh Rahman, *“Pertumbuhan modal riil terhambat oleh tingkat bunga dan apabila hambatan ini dihapuskan, Maka pertumbuhan modal riil akan begitu cepat.”* Sama halnya

dengan pendapat Keynes yang menyatakan bahwa, “*Suku bunga tidak memberikan modal yang banyak seperti yang dipercayai orang, justru suku bunga sebagai suatu tindakan yang menghambat pembangunan dunia ke arah yang lebih maju.*”

- c) Bunga menghancurkan kekayaan dengan berbagai cara. Bunga menimbulkan krisis ekonomi. Penyebabnya adalah adanya akumulasi barang karena rendahnya daya beli masyarakat dan kecenderungan untuk berkonsumsi yang juga rendah. Proses produksi akan terhambat, yang akhirnya akan menimbulkan pengangguran. Bunga memegang peran utama sebagai penyebab timbulnya krisis ekonomi.

Sehingga terlihat jelas bahwa bunga merupakan sumber permasalahan yang mengakibatkan ketidakstabilan perekonomian. Dalam perekonomian konvensional sektor riil dan moneter tidak seimbang, akibatnya kondisi sektor moneter tidak mencerminkan kondisi sektor riil dan kondisi sektor riil tidak mencerminkan kondisi sektor moneter. Dalam perekonomian Islam, sektor perbankan tidak mengenal instrumen suku bunga. Sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*). Jadi dalam sistem keuangan Islam, hasil investasi dan pembiayaan yang dilakukan bank di sektor riil menentukan besar kecilnya pembagian keuntungan di sektor moneter. Artinya sektor moneter memiliki ketergantungan pada sektor riil. Jika investasi dan produksi di sektor riil lancar, maka return pada sektor moneter akan meningkat. Artinya kondisi sektor moneter merupakan cerminan kondisi sektor riil (Nasution, 2006).

Dalam pandangan ekonomi Islam, jumlah uang beredar disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Permintaan dan penawaran uang harus didasarkan pada transaksi yang mendorong bergeraknya sektor riil. Sebab dalam pandangan Islam uang hanyalah alat untuk bertransaksi semata. Bukan digunakan sebagai alat spekulasi. Sedangkan permintaan dan penawaran uang dengan tujuan berjaga-jaga diperbolehkan sebatas memperkirakan akan timbulnya biaya diluar kebutuhan yang telah ditetapkan (darurat).

Sistem keuangan Islam sesungguhnya merupakan pelengkap dan penyempurna sistem ekonomi Islam yang berdasarkan pada produksi dan perdagangan, atau dikenal sebagai sektor riil. Kegiatan yang tinggi dalam bidang produksi dan perdagangan akan mempertinggi jumlah uang beredar, sedangkan kegiatan ekonomi yang lesu akan berakibat rendahnya perputaran dan jumlah uang beredar. Dengan kata lain, permintaan jumlah uang beredar akan lahir terutama dari motif transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang ditentukan pada umumnya oleh tingkat pendapatan uang dan distribusinya (Nasution, 2006).

Chapra (Huda, 2008) menegaskan bahwa sistem keuangan dan sistem moneter yang berbasis suku bunga tidak akan efektif dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi yang optimal, pemerataan distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya sistem keuangan dan ekonomi yang bebas riba yaitu dengan menghindari suku bunga serta menerapkan prinsip *profit loss sharing* pada lembaga keuangan/perbankan dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan efisien. Terciptanya perekonomian yang stabil ini dikarenakan sistem syariah dapat mengeliminir dan melarang kegiatan-kegiatan non produktif, haram, berbahaya, tidak baik, dan spekulatif. Kondisi ini akan mendorong pada peningkatan pemanfaatan sumber daya, mengurangi tekanan inflasi serta menanggulangi krisis ekonomi sehingga memudahkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang telah direncanakan.

Penghapusan bunga sekaligus kewajiban membayar zakat 2,5% akan meminimalkan permintaan spekulatif terhadap uang, sehingga akan memberikan stabilitas yang lebih besar terhadap permintaan uang. Faktor lain yang memperkuat kondisi ini adalah pemilik dana hanya akan memilih investasi dananya dalam bentuk bagi hasil, peluang investasi jangka pendek dan panjang dengan berbagai tingkatan risiko, agar dananya tidak tergerus zakat dan inflasi maka pemilik dana akan memilih menginvestasikan uangnya, dan *nisbah* ditentukan konvensi ekonomi dan sosial (Nasution, 2006).

Sehingga jelaslah bahwa dalam perekonomian Islam, keseimbangan antara aktivitas ekonomi riil dengan tinggi rendahnya jumlah uang beredar senantiasa

dijaga. Salah satu instrumen untuk menjaganya adalah sistem perbankan yang Islami (Nasution, 2006).

Kenyataan ini telah mencerminkan dengan jelas bahwa pada dasarnya bunga tidak memberikan keberkahan kepada manusia bahkan menjauhkan manusia dari berkah Allah sebagaimana tercantum dengan jelas pada Al Qur'an surat Al Baqarah (2: 278-279).

2.1.2.2 Kurs

Tingkat inflasi, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga secara langsung dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara (kurs). Hal ini dilihat dari sudut pandang pendekatan moneter, para ekonom antara lain Mac Donald, Taylor, dan Tucker yang pada umumnya melihat kurs valuta asing dipengaruhi oleh variabel fundamental ekonomi, antara lain jumlah uang beredar, tingkat *output* riil, tingkat suku bunga dan inflasi (Maries, 2008).

Mankiw (2001) mengemukakan bahwa jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang relatif lebih tinggi terhadap Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah mata uang asing yang semakin lama semakin banyak sepanjang waktu. Jika suatu negara memiliki tingkat inflasi yang relatif lebih rendah terhadap Amerika Serikat, satu dolar akan membeli jumlah mata uang asing yang semakin lama semakin sedikit sepanjang waktu.

Analisis ini menunjukkan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kurs nominal. Pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi menyebabkan inflasi yang tinggi. Dengan kata lain, bila pertumbuhan jumlah uang beredar meningkatkan harga barang yang di ukur dengan uang, pertumbuhan ini cenderung meningkatkan harga mata uang asing yang di ukur dalam kurs mata uang domestik. Perubahan nilai mata uang asing ini akan mendorong timbulnya kegiatan spekulasi, yang tentu saja menyebabkan terjadi fluktuasi pada nilai kurs.

Kegiatan spekulasi itu sendiri adalah hal yang dilarang dalam Islam karena dapat dipersamakan dengan perjudian, sebagaimana tercantum dalam surat Al-maidah (5) ayat 90 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah 5: 90).

Pengaruh kurs terhadap kondisi makro ekonomi berhubungan dengan tingkat harga yang berlaku. Yang mempengaruhi perilaku nasabah dalam menabung dan permintaan terhadap pembiayaan/kredit dalam menyikapi fluktuasi nilai kurs. Mankiw (2001) menyatakan jika kurs riil tinggi, barang-barang dari luar negeri relatif lebih murah, dan barang-barang domestik lebih mahal. Jika kurs riil rendah, barang-barang dari luar negeri relatif lebih mahal, dan barang-barang domestik relatif lebih murah.

Perubahan nilai tukar (kurs) akan mempengaruhi konsumen karena pengaruh dari harga barang-barang impor. Mishkin (2004) menyatakan “*the weaker of dollar leads to more expensive foreign goods makes vacationing abroad more expensive, and rises the cost of indulging your desire for imported delicacies. When the value of the dollar drops, American will decrease their purchases for foreign goods and increase their consumption of domestic goods.*”

Pada saat kurs tinggi maka barang-barang impor menjadi mahal sehingga masyarakat tidak akan membeli barang impor melainkan menggantinya dengan mengkonsumsi produk dalam negeri, baik itu berupa barang modal ataupun barang konsumsi. Bagi barang yang diproduksi dengan menggunakan faktor produksi impor kondisi ini akan meningkatkan biaya produksi yang akhirnya akan menyebabkan harga jual barang yang tinggi. Meningkatnya harga barang tersebut tentunya akan menyebabkan masyarakat atau perusahaan harus menambah jumlah dana yang disediakan untuk dikonsumsi. Sehingga secara tidak langsung dapatlah

dinyatakan daya beli masyarakat melemah, dalam arti pendapatan riil mengalami penurunan.

Tabungan dapat terjadi apabila terdapat kelebihan pendapatan, apabila harga barang mengalami kenaikan mengakibatkan pendapatan riil masyarakat mengalami penurunan. Sehingga seluruh pendapatan yang diperoleh dipergunakan untuk konsumsi. Selain itu, permintaan pembiayaan/kredit mengalami penurunan dikarenakan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan penurunan laba yang diperoleh. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang menarik bagi para pengusaha dalam mengembangkan usahanya. Bila hal ini berlangsung dalam waktu yang relatif panjang maka akan melemahkan sektor riil karena menanggung beban produksi yang tinggi sementara *effective demand* masyarakat lemah. Dan akan berdampak pula pada sektor keuangan (perbankan). Lama kelamaan jika nilai tukar tidak diintervensi tentunya akan membuat kacau perekonomian.

Namun, jika konsumsi atas produk dalam negeri meningkat maka kegiatan produksi pun akan meningkat. Dengan catatan bahwa produk dalam negeri tersebut hanya menggunakan faktor produksi domestik bukan impor. Dan saat kurs tinggi produk dalam negeri yang menggunakan bahan baku domestik akan lebih murah harganya, sehingga akan meningkatkan nilai ekspor. Dengan meningkatnya permintaan akan barang tersebut baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor tentunya akan menyebabkan minat investasi meningkat karena melihat peluang keuntungan investasi yang besar. Maka bagi pemilik USD dalam jumlah besar umumnya akan menarik dananya dari perbankan dan menggunakannya untuk melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Jika produksi dalam negeri meningkat sebagaimana diungkapkan, tentunya akan meningkatkan pendapatan nasional (*Gross Domestic Product*) dan kesejahteraan.

Dari pernyataan yang telah dikemukakan di atas, fluktuasi yang terjadi pada salah satu variabel ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini menyebabkan ikut berfluktuasinya variabel yang lain. Dengan demikian terjadi hubungan yang simultan antar variabel ekonomi makro. Sebab perubahan dari salah satu variabel akan menyebabkan ikut berubahnya variabel yang lain.

2.1.2.3 Gross Domestik Product (GDP)

Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi relatif mudah mencukupi segala kebutuhannya, sehingga menikmati kemewahan. Jadi tidaklah mengherankan jika orang-orang yang berpendapatan tinggi menikmati standar hidup yang lebih tinggi pula. Karena perekonomian merupakan gabungan dari sekian banyak rumah rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi di berbagai pasar sehingga ekonomi makro dan mikro terkait erat.

Gross Domestic Product (GDP) merupakan salah satu pijakan untuk memantau kinerja ekonomi secara keseluruhan yang mencerminkan perubahan ekonomi. *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan data statistik ekonomi kunci karena dengan segala keterbatasannya, *Gross Domestic Product* (GDP) diakui sebagai ukuran utama tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara. Indeks ini pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu negara untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat daripada tingkat pertumbuhan penduduknya. Konsep ini sudah terlanjur diyakini serta diterapkan secara luas sebagai tolok ukur penilaian pertumbuhan ekonomi nasional.

Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. *Gross Domestic Product* (GDP) menghitung pendapatan total setiap orang dalam suatu perekonomian serta pengeluaran total atas seluruh output. Bagi sebuah perekonomian secara keseluruhan, pendapatan sama dengan pengeluaran (Mankiw, 2001).

Gross Domestic Product (GDP) terdiri atas dua jenis, yaitu nominal dan riil. *Gross Domestic Product* (GDP) nominal menggunakan harga-harga yang tengah berlaku sebagai landasan perhitungan nilai produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Sedangkan *Gross Domestic Product* (GDP) riil menggunakan harga konstan pada tahun dasar untuk menghitung nilai total produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian. *Gross Domestic Product* (GDP) riil tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, maka *Gross Domestic Product* (GDP) riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi, ukuran produksi setiap tahun. *Gross Domestic Product* (GDP) riil merupakan ukuran yang tepat untuk mengetahui tingkat produksi barang dan jasa dari suatu perekonomian. Tujuan

perhitungan *Gross Domestic Product* (GDP) adalah untuk mengetahui sejauh mana kinerja suatu perekonomian secara keseluruhan. Konsep *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengungkapkan sejauh mana kemampuan perekonomian mencukupi kebutuhan dan keinginan penduduknya. Dengan demikian, *Gross Domestic Product* (GDP) riil merupakan ukuran kesejahteraan yang lebih baik daripada *Gross Domestic Product* (GDP) nominal. Maka atas dasar itu, *Gross Domestic Product* (GDP) riil lebih lazim digunakan (Mankiw, 2001).

Besaran *Gross Domestic Product* (GDP) sebagai proxy dari pendapatan masyarakat memiliki pengaruh yang besar bagi perbankan khususnya dalam penghimpunan dana. Pengaruh suku bunga terhadap tingkat tabungan ditolak oleh Keynes. Keynes berpendapat bahwa tingkat pendapatan lebih menjamin persamaan antara tabungan dan investasi daripada suku bunga. Tabungan tidak begitu bergantung pada bunga sebagaimana pada tingkat investasi dan kesempatan kerja. Para pengusaha, bukannya para penabung yang mengganggu keseimbangan dan membawa dinamisme pertumbuhan perekonomian (Mannan, 1997).

Maka dari itu sudah selayaknya pendapatan yang kita terima haruslah dikelola dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan dalam surat An Nisaa (4) ayat 5 berikut ini:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik” (QS. An Nisaa 4: 5).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang diamanatkan Allah harus dikelola oleh pihak yang tepat sehingga produktif agar tidak menyusut dan hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar zakat.

Diharapkan multiplier dari produktivitas harta ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian. Salah satu pihak yang dapat membantu mengelola harta dengan produktif adalah pihak perbankan yang akan menyalurkan dana pihak ketiga melalui pembiayaan produktif. Perbankan syariah merupakan pilihan yang tepat untuk hal tersebut bagi pihak yang tidak dapat mengelola sendiri dananya baik karena keterbatasan waktu, kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga semakin besar pendapatan maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang akan dihimpun perbankan dan tentunya akan semakin meningkatkan aset perbankan syariah baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.1.2 Aset Perbankan Syariah

Sebagai institusi yang berdasarkan doktrin ideologi, bank syariah harus memenuhi prinsip-prinsip bisnis Islami, dimana pelarangan riba hanyalah salah satu aspek dari keseluruhan prinsip tersebut. Prinsip-prinsip lain yang harus dipegang teguh adalah: bisnis dilakukan dalam usaha yang legal dan halal, memenuhi seluruh kewajiban dan tanggung jawab, bisnis harus didasari kejujuran, keadilan dan kesamaan, menghindari pemborosan dan kemubaziran, kekayaan digunakan dalam kegiatan halal dan berkah, membantu kebutuhan orang lain, dan terdapat dalam kejelasan akad dalam bertransaksi (Haron: 1997). Hal ini sesuai dengan dengan Al Qur'an surat An Nisaa (4) ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"*.

Secara spesifik pengembangan usaha bank dipengaruhi usaha bank terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain produk, kebijakan suku bunga (imbal hasil), kualitas layanan, suasana kantor bank, lokasi kantor, dan reputasi bank. Sedangkan faktor ektern adalah kondisi perekonomian, kegiatan dan kondisi pemerintah, kondisi dan pengembangan pasar uang dan modal, kebijakan pemerintah, dan peraturan Bank Indonesia (Rivai, 2007).

Pertumbuhan suatu bank sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank tersebut. Untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank, ada beberapa parameter yang dijadikan sebagai tolak ukur. Bank Indonesia dalam Laporan Pengembangan Perbankan-LPP 2006 menjadikan tujuh hal sebagai indikator utama perbankan, yaitu: total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), *earning*, CAR, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Loan/Financing* (NPL/NPF), *Return on Aset* (ROA), *Loan to Deposit Ratio* (LDR)/*Financing to Deposit Ratio* (FDR).

Perkembangan ekonomi dan moneter yang berfluktuasi serta persaingan bisnis antar bank yang sangat ketat berpengaruh langsung pada pengelolaan aset yang akan mempengaruhi perkembangan aset tersebut. Umumnya bank kesulitan mendapatkan dana murah dan kurang leluasa menerapkan imbal hasil, selain itu kondisi sulit juga dihadapi bank saat nasabah tidak memenuhi kewajibannya beserta imbal hasil (Rivai, 2007). Sehingga timbul dilema pengelolaan bank untuk mengutamakan profitabilitas dan likuiditas. Maka dari itu diperlukan pengelolaan aset yang baik untuk terus meningkatkan pertumbuhan perbankan. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Al Qur'an surat Yusuf (12) ayat 54 berikut ini:

قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."

Ayat tersebut sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani yaitu "sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan secara *iqtan*". *Iqtan* dalam hal ini dapat dipersamakan

dengan profesionalisme. Jadi sebaiknya jika melakukan sesuatu apalagi memegang amanah lakukanlah secara profesional agar membawa pada kebaikan.

Hal ini juga sejalan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu: “*apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya maka tunggulah kehancurannya*”. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan sesuatu sangatlah penting, sehingga dengan profesionalisme akan menghasilkan sesuatu yang baik pula.

Maka dari itu pihak perbankan haruslah berhati-hati dan penuh tanggung jawab dalam mengelola asetnya sehingga kualitasnya baik. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadist riwayat ad-Dailami yaitu “*bahwa amanah akan menarik rezeki dan sebaliknya khianat akan mengakibatkan kefakiran*”. Hal ini tentu sangat mencerminkan bahwa dengan baiknya pengelolaan bank maka akan menarik masyarakat untuk meletakkan dananya karena kepercayaannya bertambah sebagai dampak amanahnya perbankan Islam tersebut.

Aset sering juga disebut sebagai aktiva atau harta. Menurut *Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* 1998, Komponen Aktiva Lembaga Keuangan dan Bank Syariah terdiri atas: kas dan setara kas, piutang penjualan, investasi, dan aset Lain-Lain. Dalam neraca keuangan perbankan aktiva seimbang dengan pasiva. Sementara dalam perbankan syariah di Indonesia terdapat fenomena aktiva yang lebih dominan adalah pembiayaan. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan juga mempengaruhi pertumbuhan aset (Cleopatra, 2008).

Aset bank mencerminkan alokasi dana yang dimilikinya, karena berdasarkan neraca bank umum aktiva dikelompokkan atas cadangan, kredit/pembiayaan, investasi sekuritas, dan aset lainnya (Darna, 2006). Dana pihak ketiga merupakan bagian terbesar aktiva, maka peningkatan dana pihak ketiga akan berpengaruh pada pertumbuhan aset perbankan. Pertumbuhan aset suatu bank diawali keberhasilan menghimpun dana, baik modal sendiri maupun dari pihak ketiga. Semakin besar modal suatu bank semakin tinggi *leverage* bank dalam menghimpun dana pihak ketiga yang memungkinkan bank memperbesar *earning asset*nya guna memaksimalkan keuntungan atau nilai saham pemilik bank (Ali, 2004).

Pengelolaan aset perbankan dalam pelaksanaan fungsi intermediasinya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendapatan bagi hasil yang memadai dengan memperhatikan kaidah-kaidah bisnis yang Islami. Terpuruknya pendapatan yang memadai menjadi hal penting dari sudut pandang syariah mengingat kewajiban dalam fungsi sosial, dividen, bonus, bagi hasil dan sebagainya hanya dapat direalisasi dengan baik tanpa mengganggu modal yang ada jika penghasilan yang diperoleh dari pengelolaan asetnya cukup memadai (Mansur, 2007).

Agar bank mampu meraih laba atau pendapatan dalam jumlah yang cukup, maka penempatan dana ke aktiva produktif dengan sendirinya harus dilakukan secara cepat, cermat, dan selektif yang kemudian dibarengi pula dengan pembinaan nasabah secara konstruktif dan berkesinambungan (Mansur, 2007).

Secara umum peningkatan aset perbankan syariah juga dapat disebabkan oleh penambahan jumlah bank syariah baik pendirian bank syariah baru (BUS atau UUS) maupun konversi dari perbankan konvensional. Sehingga jelas terlihat faktor internal dan eksternal sangat berpengaruh pada pertumbuhan perbankan.

Karim (2005 dalam Cleopatra 2008) menyatakan bahwa kecilnya proporsi aset bank syariah di Indonesia menyebabkan bank syariah belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Idealnya, ada bank BUMN yang dikonversi menjadi syariah. Ini akan menjadi salah satu dukungan pemerintah terhadap pertumbuhan industri keuangan Islam. Dua alasan dikemukakan Karim mengapa volume bank syariah harus lebih besar. Yang pertama adalah kestabilan ekonomi nasional. Bank syariah terbukti lebih tahan krisis. Dengan makin banyaknya bank syariah, ekonomi nasional lebih stabil. Yang kedua adalah kemampuan menarik dana syariah dari luar negeri. Dengan besarnya volume bank syariah, kemampuan penyerapan dana investasi dari luar negeri khususnya negara-negara Islam di Timur Tengah akan menjadi besar.

2.2 Penelitian Sebelumnya Berkaitan dengan Variabel dan Model

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa banyak faktor/variabel yang mempengaruhi aset perbankan, baik syariah maupun konvensional. Telah banyak pula penelitian yang dilakukan berkaitan dengan faktor-faktor tersebut, khususnya perbankan syariah dengan menggunakan berbagai macam model yang berbeda sesuai dengan tujuan penelitiannya masing-masing. Model yang paling populer dan banyak digunakan adalah model regresi.

Penelitian Farikh (2007) membandingkan antara bank syariah dan konvensional. Penelitian Farikh ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Haron dan Azmi (2005) di Malaysia dengan alasan modelnya mengakomodasi variabel ekonomi makro, tingkat suku bunga perbankan konvensional dan *equivalent rate* yang berguna untuk mengetahui *displacement fund* baik pada perbankan syariah maupun konvensional.

Analisis dilakukan secara terpisah untuk masing-masing jenis dana pihak ketiga, yaitu giro, tabungan, dan deposito karena Farikh meyakini masing-masing tipe dana pihak ketiga ini memiliki karakteristik dan pengaruh berbeda terhadap adanya perubahan atas imbal hasil dan variabel makro ekonomi. Farikh menggunakan *equivalent rate*, tingkat suku bunga, SBI, IHSG, CPI, dan M_1 sebagai variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data bersumber dari Bank Indonesia berupa data time series periode Februari 2004 s.d. Maret 2007. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, analisis faktor-*principal component analysis*, dan *cointegration*. Model yang digunakan Farikh adalah:

- 1) $Giro_{cv_t} = \alpha + \beta_1 dep_rate + \beta_2 deprate_is + \beta_3 ihsg + \beta_4 sbi + \beta_5 inflasi + \beta_6 M_1$
- 2) $Giro_{is_t} = \alpha + \beta_1 dep_rate + \beta_2 deprate_is + \beta_3 ihsg + \beta_4 sbi + \beta_5 inflasi + \beta_6 M_1$
- 3) $Tab_{cv_t} = \alpha + \beta_1 tab_rate + \beta_2 tabrate_is + \beta_3 ihsg + \beta_4 sbi + \beta_5 inflasi + \beta_6 M_1$
- 4) $Tab_{is_t} = \alpha + \beta_1 tab_rate + \beta_2 tabrate_is + \beta_3 ihsg + \beta_4 sbi + \beta_5 inflasi + \beta_6 M_1$
- 5) $Dep_{cv_t} = \alpha + \beta_1 dep_rate + \beta_2 deprate_is + \beta_3 ihsg + \beta_4 sbi + \beta_5 inflasi + \beta_6 M_1$
- 6) $Dep_{is_t} = \alpha + \beta_1 dep_rate + \beta_2 deprate_is + \beta_3 ihsg + \beta_4 sbi + \beta_5 inflasi + \beta_6 M_1$

keterangan:

$Giro_{cv}$: jumlah dana pada *current account* di bank konvensional

Giro_is : jumlah dana pada *current account* di bank syariah
 Tab_cv : jumlah dana pada *saving account* di bank konvensional
 Tab_is : jumlah dana pada *saving account* di bank syariah
 Dep_cv : jumlah dana pada *investment account* di konvensional
 Dep_is : jumlah dana pada *fixed account* di bank bank syariah
 dep_rate : tingkat suku bunga pada deposito berjangka di bank konvensional
 deprate_is : tingkat bagi hasil (*equivalent rate*) pada *investment account* di bank syariah
 tab_rate : tingkat suku bunga pada simpanan tabungan di bank konvensional
 tabrate_is : tingkat bagi hasil (*equivalent rate*) pada simpanan tabungan di bank syariah
 ihsg : *index composite* (indeks harga saham gabungan)
 sbi : suku bunga Bank Indonesia
 inflasi : tingkat inflasi (*consumer price index*)
 M₁ : jumlah uang beredar

Hasil penelitian Farikh menunjukkan pada perbankan konvensional, tingkat bagi hasil perbankan syariah tidak memiliki pengaruh signifikan, artinya tidak terjadi *displacement fund* pada tingkat bagi hasil mengalami kenaikan. Sedangkan faktor moneter dan perbankan memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor moneter berpengaruh positif terhadap semua tipe deposit perbankan konvensional kemungkinan akibat nasabah konvensional hanya menjadikan faktor moneter sebagai tolak ukur/*benchmark* dalam menenpatkan dananya. Pada perbankan syariah, variabel tingkat bagi hasil tidak memiliki pengaruh signifikan, positifnya pengaruh faktor moneter terhadap semua tipe deposit perbankan syariah merupakan gambaran ketahanan nasabah bank syariah. Jadi, tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap tingkat deposit, khususnya pada perbankan syariah.

Yunita (2008) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak ketiga, namun hanya perbankan syariah saja. Data yang digunakan terdiri dari variabel ekonomi makro yang terdiri atas tingkat suku bunga SBI 1 bulan, tingkat inflasi, dan kurs US dolar. Baik variabel independen

maupun dependen yang mewakili diambil sampel dalam kurun waktu 42 bulan yakni terhitung sejak bulan Maret 2004 sampai Agustus 2007.

Fluktuasi variabel makro ekonomi SBI yang digunakan adalah *Net Equivalent Rate* (NER) yang merupakan hasil pengurangan *equivalent rate* dengan suku bunga SBI dan inflasi menggunakan *Real Equivalent Rate* (RER) yang merupakan hasil pengurangan *equivalent rate* dengan tingkat inflasi. Adapun *equivalent rate* yang digunakan adalah *equivalent rate* deposito *mudharabah* karena proporsinya lebih besar dibandingkan jenis dana pihak ketiga lainnya serta biasanya masyarakat menggunakannya sebagai pembanding dengan suku bunga deposito perbankan konvensional. Karena variabel DPK dan ExR dalam satuan jutaan dan ribuan Rupiah sementara variabel NER dan RER dalam satuan persentase, Maka variabel DPK dan ExR dirubah dalam bentuk model natural log menjadi lnDPK dan lnExR.

Berdasarkan analisis regresi linier jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah terhadap NER, RER dan ExR adalah sebagai berikut :

- 1) persamaan DPK dan NER : $\ln DPK = 0.353395 \text{ NER} - 0.965409$
(11.36887) (-6.888910)
- 2) persamaan DPK dan RER : $\ln DPK = 44.88473 \text{ RER} - 402.8910$
(2.556655) (-2.497912)
- 3) persamaan DPK dan ExR : $\ln DPK : - 12.82310 \ln ExR + 1163001$
(-1.817372) (1.794101)

Selama kurun waktu penelitian, dari tiga persamaan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Net Equivalent Rate* (NER) secara signifikan mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat suku bunga SBI mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah. Apabila terjadi peningkatan pada suku bunga SBI, maka terjadi *displacement* pada dana simpanan, sehingga mengakibatkan penurunan jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan SBI dengan asumsi *equivalent rate* tetap maka akan terjadi peningkatan jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah.

Real Equivalent Rate (RER) secara signifikan mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga perbankan syariah. Apabila terjadi peningkatan inflasi, maka dana pihak ketiga perbankan syariah akan mengalami penurunan diakibatkan oleh penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang (*the fall of purchasing power*) sehingga dibutuhkan uang dalam jumlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang yang sama. Dalam kondisi ini, untuk memenuhi konsumsi masyarakat penarikan dana simpanan perbankan syariah sangat mungkin terjadi.

Kurs mempengaruhi besarnya jumlah DPK perbankan syariah dalam hubungan yang negatif. Kenaikan kurs mata uang US dolar menyebabkan penurunan DPK perbankan syariah disebabkan oleh penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah bank syariah.

Penelitian Maries (2008) membahas dampak dari fluktuasi variabel makro saja terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun dan penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah. Walaupun cakupannya sudah mencakup dana pihak ketiga dan pembiayaan pada perbankan syariah namun hanya menggunakan variabel makro saja yang terdiri dari inflasi, M_2 , kurs, dan SBI 1 bulan. Maries dalam penelitiannya lebih menekankan pada respon dana pihak ketiga yang dihimpun dan penyaluran pembiayaan atas perubahan variabel makro.

Data berupa *time series* 2003 s.d. 2007. Penelitian ini menggunakan metode VAR yang menekankan pada analisis *impulse response function* dan *variance decomposition* guna melihat *shock* variabel-variabel tersebut dan mengetahui manakah yang paling dominan mempengaruhi.

Penelitian ini menggunakan enam model *Vector Autoregressive* dari enam variabel yang berkedudukan sama, seperti dijabarkan dibawah ini sebagai berikut:

- 1) $PMBY_t = \beta_{10} + a_{11}(L)PMBY_t + a_{12}(L)DPK_t + a_{13}(L)INFL_t + a_{14}(L)KURSt + a_{15}(L)SBI_t + a_{16}(L)M2_t + \epsilon_{1t}$
- 2) $DPK_t = \beta_{20} + a_{21}(L)PMBY_t + a_{22}(L)DPK_t + a_{23}(L)INFL_t + a_{24}(L)KURSt + a_{25}(L)SBI_t + a_{26}(L)M2_t + \epsilon_{2t}$
- 3) $INFL_t = \beta_{30} + a_{31}(L)PMBY_t + a_{32}(L)DPK_t + a_{33}(L)INFL_t + a_{34}(L)KURSt + a_{35}(L)SBI_t + a_{36}(L)M2_t + \epsilon_{3t}$

$$4) \text{KURSt} = \beta_{40} + a_{41}(L)\text{PMBYt} + a_{42}(L)\text{DPKt} + a_{43}(L)\text{INFLt} + a_{44}(L)\text{KURSt} + a_{45}(L)\text{SBIIt} + a_{46}(L)\text{M2t} + \epsilon_{1t}$$

$$5) \text{SBIIt} = \beta_{50} + a_{51}(L)\text{PMBYt} + a_{52}(L)\text{DPKt} + a_{53}(L)\text{INFLt} + a_{54}(L)\text{KURSt} + a_{55}(L)\text{SBIIt} + a_{56}(L)\text{M2t} + \epsilon_{1t}$$

$$6) \text{M2t} = \beta_{60} + a_{61}(L)\text{PMBYt} + a_{62}(L)\text{DPKt} + a_{63}(L)\text{INFLt} + a_{64}(L)\text{KURSt} + a_{65}(L)\text{SBIIt} + a_{66}(L)\text{M2t} + \epsilon_{1t}$$

Keterangan:

PMBY : pembiayaan

DPK : dana pihak ketiga

INFL : inflasi

KURS : nilai tukar Rupiah terhadap US \$

SBI : tingkat suku bunga SBI

M2 : jumlah uang beredar

L : lag atau periode

ϵ : error atau penyimpangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukannya Maries berkesimpulan bahwa dari hasil *Impulse Response Function* (IRF) dapat disimpulkan bahwa adanya respon DPK yang dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan merespon terhadap *shock* yang ditimbulkan oleh fluktuasi masing-masing variabel ekonomi makro, dengan rincian yaitu respon dana pihak ketiga tinggi di awal terjadinya fluktuasi inflasi dan mencapai puncak pada bulan ketiga dan turun cepat pada bulan kelima setelah itu perlahan mencapai *equilibrium* pada bulan kedubelas. Dana pihak ketiga juga merespon kurs tinggi di awal bulan pertama kemudian turun dan lebih tinggi lagi pada bulan keempat dan turun perlahan hingga bulan kelimabelas yang secara umum disebabkan oleh inflasi. Respon dana pihak ketiga terhadap M_2 mencapai puncak pada bulan keempat dan setelahnya mengalami penurunan perlahan dan stabil pada bulan ketigabelas. Sedangkan pada SBI respon dana pihak ketiga berlangsung selama tigabelas bulan dan setelah bulan kesepuluh berangsur menuju keseimbangan.

Respon pembiayaan terhadap inflasi berlangsung selama sembilan belas bulan dan setelahnya baru menuju keseimbangan. Sedangkan *shock* kurs terhadap pembiayaan berlangsung selama dua puluh lima bulan. Respon pembiayaan terhadap M_2 berlangsung selama lima belas bulan dan *shock* SBI mulai terlihat pada bulan kedua dan meningkat pada bulan kelima kemudian menurun dan stabil setelah bulan kedelapan belas.

Makiyan (2001) melakukan penelitian terhadap pinjaman pada seluruh bank syariah di Iran periode 1984-1994. Variabel yang digunakan adalah pinjaman (*dependen*), tingkat bagi hasil, total dana pihak ketiga, inflasi (*independen*). Model yang digunakan Makiyan adalah:

$$SL_t = b_0 + b_1 Rt + b_2 TDt + b_3 It + e$$

Keterangan:

SL_t : Penawaran pinjaman

Rt : Rata-rata tingkat bagi hasil

TDt : Jumlah dana pihak ketiga (DPK)

It : Tingkat inflasi

b_i : Parameter yang diestimasi

e_t : *Error term*

Metodologi yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian Makiyan menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil tidak berpengaruh, sedangkan variabel yang berpengaruh adalah total dana pihak ketiga dan inflasi sehingga intervensi pemerintah memegang peranan penting dari pada faktor ekonomi.

Penelitian Cleopatra (2008) tentang analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan proporsi aset perbankan syariah di Indonesia menggunakan variabel jumlah kantor bank syariah, proporsi deposito, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), proporsi pembiayaan bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), tingkat suku bunga SBI, *equivalent rate* tingkat bagi hasil SWBI, tingkat inflasi, tingkat suku bunga deposito bank konvensional, tingkat suku bunga kredit bank konvensional, dan *office channeling*. *Office channeling* ini sebagai variabel *dummy*. Data yang

digunakan bersumber dari Bank Indonesia berbentuk *time series* April 2005 s.d. September 2007. Penelitian Cleopatra menggunakan model regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PA = \beta_0 + \beta_1JK + \beta_2ProDep + \beta_3BUS + \beta_4FDR + \beta_5ProBH + \beta_6NPF + \beta_7Inf + \beta_8SBI + \beta_9SWBI + \beta_{10}OC + \beta_{11}DepBK + \beta_{12}BKBK$$

Keterangan:

- PA : proporsi aset bs terhadap keseluruhan aset perbankan nasional
JK : jumlah kantor perbankan syariah
ProDep : proporsi deposito terhadap DPK
BUS : jumlah UUS dan BUS
FDR : financing to deposit ratio
ProBH : proporsi pembiayaan bagi hasil terhadap dpk
NPF : non performing financing
Inf : tingkat inflasi nasional
SBI : tingkat suku bunga bank Indonesia
SWBI : *equivalent rate* tingkat bagi hasil sertifikat wadiah bank indonesia
OC : variabel *dummy* kebijakan diberlakukannya *office channeling* dimana:
OC=0 adalah sebelum diberlakukan dan OC=1 adalah setelah diberlakukan
DepBK : tingkat suku bunga deposito bank konvensional, satuan persentase
BKBK : tingkat suku bunga kredit

Dari seluruh variabel yang dimasukkan ke dalam model, variabel yang signifikan mempengaruhi proporsi aset perbankan syariah terhadap keseluruhan aset perbankan nasional adalah *Non Performing Financing* (NPF), tingkat suku bunga SBI, inflasi, tingkat suku bunga kredit bank konvensional, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan porsi pembiayaan bagi hasil bank syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi deposito, SBI, dan FDR bernilai negatif yang berarti penurunan nilai proporsi deposito, SBI dan FDR akan meningkatkan proporsi aset. Hal ini menunjukkan perbankan syariah harus mengurangi pembiayaan dan meningkatkan DPK yang bersumber dari tabungan

dan giro. Dari hasil penelitiannya Cleopatra menyarankan pembukaan bank syariah baru dan peningkatan efisiensi sehingga margin pembiayaan lebih murah daripada suku bunga bank konvensional

Dari semua hasil penelitian tersebut banyak menggunakan variabel makro, variabel yang berkaitan dengan *return* yang diberikan perbankan. Walaupun berdasarkan teori variabel-variabel makro tersebut tidak secara langsung dapat mempengaruhi aset perbankan.

Berdasarkan studi literatur dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut dapat disimpulkan masih banyak ruang untuk melakukan penelitian berkaitan dengan aset perbankan khususnya perbankan syariah guna memperkaya model yang telah ada.

Perbedaan utama antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian sebelumnya adalah:

Farikh melakukan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghimpunan DPK perbankan syariah dan konvensional dengan menggunakan variabel perbankan dan moneter. Faktor moneter terdiri dari IHSG dan M_1 sedangkan faktor perbankan adalah SBI, inflasi, tingkat bagi hasil (*equivalent rate*) serta tingkat suku bunga deposito dan tabungan.

Studi yang dilakukan Yunita mencoba menjawab rendahnya penghimpunan DPK perbankan syariah di Indonesia di tengah dukungan potensi pangsa pasar domestik dan internasional yang begitu besar dengan menggunakan menggunakan besaran kurs, *net equivalent rate* dan *real equivalent rate* dengan metode regresi linear.

Penelitian Maries tentang dampak fluktuasi variabel makro terhadap penghimpunan DPK dan pembiayaan perbankan syariah dengan menggunakan variabel makro berupa inflasi, SBI, M_2 , dan kurs.

Makiyan melakukan studi atas pinjaman seluruh bank syariah di Iran dengan menggunakan tingkat bagi hasil, total DPK, dan inflasi.

Cleopatra dalam penelitiannya menggunakan 12 variabel independen untuk melihat pengaruhnya terhadap proporsi aset perbankan syariah. variabel yang digunakan adalah jumlah kantor bank syariah, proporsi deposito, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), *Financing to Deposit*

Ratio (FDR), proporsi pembiayaan bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF), tingkat suku bunga SBI, *equivalent rate* tingkat bagi hasil SWBI, tingkat inflasi, tingkat suku bunga deposito bank konvensional, tingkat suku bunga kredit bank konvensional, dan *office channeling*.

Dari sisi variabel penelitian ini menggunakan pertumbuhan variabel ekonomi makro berupa pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan GDP serta *equivalent rate*. Sedangkan dari sisi metode analisis berbeda dengan Maries (2008) yang menggunakan metode VAR untuk melihat *shock* atas masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk melihat pengaruh variabel terkait penelitian.

2.3. Penerapan Teori dalam Pemecahan Masalah

Perkembangan perbankan syariah dipengaruhi oleh banyak faktor baik faktor yang berasal dari dalam perbankan itu sendiri (faktor internal) maupun faktor eksternalnya. Telah terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh faktor-faktor baik yang internal maupun eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan perbankan, khususnya perbankan syariah.

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Yunita (2008) bahwa *net equivalent rate*, *real equivalent rate*, dan kurs mempengaruhi DPK perbankan syariah. Sedangkan penelitian Farikh (2007) menyimpulkan bahwa *equivalent rate* tidak signifikan mempengaruhi DPK perbankan syariah dan konvensional. Penelitian Maries (2008) menunjukkan bahwa DPK dan pembiayaan perbankan syariah merespon perubahan inflasi, M_2 , SBI 1 bulan, dan kurs walau tidak satupun dari variabel tersebut yang mempengaruhi secara dominan. Makiyan (2001) dalam penelitiannya membuktikan bahwa di Iran yang mempengaruhi pinjaman perbankan syariah adalah inflasi dan DPK, sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh. Penelitian Cleopatra (2008) memperlihatkan bahwa proporsi bagi hasil berpengaruh pada pertumbuhan aset perbankan syariah.

Guna menjawab pertanyaan penelitian akan dipergunakan model regresi linier berganda sebagaimana yang dipergunakan Yunita (2008), Farikh (2007), Makiyan (2001), dan Cleopatra (2008). Sehingga akan terlihat bagaimana

pengaruh pertumbuhan variabel ekonomi makro (pertumbuhan M_2 , pertumbuhan kurs, dan pertumbuhan GDP) serta *equivalent rate* terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia.

Model analisis ini digunakan untuk menjelaskan teori ekonomi yang ada dan mempertajam informasi mengenai keterkaitan pergerakan beberapa variabel yang sedang dianalisis secara konklusif dan mengetahui lebih pasti hubungan antar variabel yang diteliti.

